**ABSTRAK**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kewenangannya ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kapuas, namun pada penelitian kali ini penulis memfokuskan penelitian di Kelurahan Selat Dalam. Pelaksanaan pemungutan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penerimaan dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam untuk tiga tahun terakhir belum optimal, masih banyak potensi pajak yang belum tergali dengan baik.

Tujuan Laporan Akhir ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Kelurahan Selat Dalam untuk mengoptimalisasikan penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Data yang didapat dilapangan diolah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah *person*, *place*, dan *paper* dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian selama proses magang di Kelurahan Selat Dalam dan dipadukan dengan teori keberhasilan peningkatan penerimaan pajak melalui Upaya Pajak, Hasil Guna dan Daya Guna dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum optimal dan masih harus dioptimalkan dimasa yang akan mendatang.

*Kata Kunci : Optimalisasi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

**ABSTRACT**

*Tax of Land and Property of Rural and Urban is a tax on the land and/or property owned, controlled and exploited by personal or bodies, except areas for plantation, forestry, and mining business activities. In the implementation of tax collection Land and Property and Rural and Urban authority by the Management Board of Regional Taxes and Levies in Kapuas Regency, but on this research the author focus in Selat Dalam village. The implementation of collection is based on Regional Regulation Kapuas Regency No. 10 of 2013 on Tax of Land and Property of Rural and Urban. The Reveneu of tax sector especially Tax of Land and Property of Rural and Urban for the last three years is not optimal, there are still many potential tax that have not been well utilized.*

*This final report is to describe the implementation of tax collection Land and Property of Rural and Urban in Selat Dalam Village Selat District Kapuas Regency, knowing the supporting factors and obstacles in the collection Tax of Land and Property of Rural and Urban, as well as the efforts made by Management Board of Regional Taxes and Levies and Selat Dalam Village to increase revenue from tax sector Land and Property of Rural and Urban. Data is in the square processed by descriptive research method with qualitative approach. The data used are person, place, and paper with the technique of data collection through observation, interviews and documentation.*

*Based on research during an internship at the Selat Dalam Village and with the combined theories of tax revenues increased success Land and Property of Rural and Urban through the Tax Effort, Effectiveness and Efficiency can be concluded that the Optimization Tax Collection of Land and Property of Rural and Urban is not optimal and must be optimized in the future.*

*To measure Keywords: Optimization, Tax of Land and Property of Rural and Urban*